

BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG LEGAL DALAM TRANSAKSI ONLINE

TIARA DHANA DANELLA, Dr. Sihabbudin, SH, MH, Siti Hamidah, SH, MM.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: tiaradhana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan keberadaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia tidak didukung oleh Bank Indonesia dan menyebabkan kekosongan hukum. Namun dengan pemakaian *bitcoin* yang semakin meningkat di Indonesia diperlukan adanya regulasi untuk mengatur *bitcoin* sehingga adanya perlindungan dan kejelasan hukum mengenai alat pembayaran virtual ini. Singapura merupakan salah satu Negara yang telah meregulasi *bitcoin* dengan pengenaan pajak. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membandingkan *bitcoin* sebagai alat pembayaran virtual di Indonesia dan di Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Kemudian seluruh data yang ada diolah secara deskriptif analitis. Urgensi dari penelitian ini adalah karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang *bitcoin* sehingga belum adanya kepastian dan perlindungan hukum.

Kata kunci : alat pembayaran legal, *bitcoin*, transaksi online

Abstract

This research is conducted because the usage of bitcoin as a payment method is not supported by Bank of Indonesia and there has been no clear legal regulation of bitcoin. However, due to increasing usage of bitcoin as a payment method, this regulation needs to be established to provide legal protection and clarity. Singapore is one of the countries that regulates bitcoin with taxes. The purpose of this paper is to compare bitcoin as a virtual payment method in Singapore and Indonesia. This research is a normative juridical research, with approximation of legislation and comparative approach as its research methods. All of the data inside this paper is then reviewed in descriptive and analytical manner. The urgency of this research comes from the fact that there has been no regulation regarding bitcoin and thus the legal impact and protection has been unclear.

Keyword : legal payment instrument, bitcoin, online transactions

A. PENDAHULUAN

Pada pembangunan yang semakin berkembang, banyak teknologi baru yang muncul dan menarik perhatian orang banyak, salah satunya adalah perkembangan teknologi internet. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar *Internet Protocol Suite* yang terhubung secara global, dengan internet ini masyarakat dapat melakukan banyak hal, dari sekedar main-main sampai mengadakan usaha online.

Seiring perkembangannya juga, usaha online ini turut berubah dalam hal tata cara pembayaran. Pembayaran transaksi online tidak lagi hanya memakai nominal sejumlah uang, namun memakai alternative pembayaran yaitu uang virtual yang disebut dengan *bitcoin*. *Bitcoins* adalah jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital. Bitcoin merupakan jaringan pembayaran *peer-to-peer* desentralisasi pertama yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara¹. Dari sudut pandang pengguna, *Bitcoins* serupa seperti uang tunai di dunia internet. *Bitcoins* tidak dapat diuangkan namun dapat digunakan untuk membeli kebutuhan barang di internet.

Bitcoin adalah mata uang digital yang berada di dalam system jaringan pembayaran open source P2P (*peer-to-peer*). P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap *station* atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank. Bitcoin disebut *cryptocurrency*, yaitu sebuah bentuk alat pembayaran yang menggunakan *cryptography* atau algoritma pengamanan khusus dalam mengontrol management dan pembuatan Bitcoin.

Berdasarkan perkembangan perekonomian yang begitu pesat di Singapura *bitcoins* telah diakui secara legal dan ditetapkan sebagai komoditi. Pemerintah

¹ *Apa Itu Bitcoins?*, <https://bitcoin.org/id/faq> (diakses pada tanggal 20 September)

Singapura telah mengeluarkan regulasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat dilakukan dengan menggunakan uang virtual ini. Beredarnya *bitcoins* di Singapura telah didukung oleh regulasi yang dikeluarkan pemerintah Singapura sebagai suatu investasi yang menyakinkan dengan menetapkan pajak dari *bitcoins* tersebut sehingga pengaturan *bitcoins* di Singapura menjadi jelas dan tidak ada kekosongan hukum dan pengguna *bitcoins* di Singapura mendapatkan perlindungan hukum atas pemakaiannya.

Menurut Bank Indonesia sebagai regulator system pembayaran di Indonesia *bitcoins* dinilai belum sesuai dengan beberapa undang-undang yang berlaku dalam dunia perbankan, yaitu Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang Mata Uang dinyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang disebut rupiah, dan dalam Undang-undang Bank Indonesia dinyatakan mata uang yang sah beredar di Negara Republik Indonesia adalah uang rupiah. Oleh karena itu dari penjelasan yang telah di jelaskan diatas akan di analisis kelegalan bitcoin di Indonesia dengan menggunakan perbandingan peraturan *bitcoins* yang ada di Indonesia dan peraturan *bitcoins* yang ada di Singapura.

B. MASALAH

Apakah *bitcoins* (alat pembayaran virtual di dunia maya) dikategorikan sebagai alat pembayaran yang legal di Indonesia mengingat belum ada regulasi yang mengatur?

C. PEMBAHASAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti ketentuan-ketentuan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan Penelitian hukum normatif dikonsepskan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepskan sebagai

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas². Dengan digunakannya penelitian ini peneliti akan menganalisis kedudukan dan legalitas bitcoin di Indonesia dengan membandingkan peraturan yang ada di Indonesia dan Singapura. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statuta Approach* atau pendekatan perundang-undangan. Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat isi pasal 1 nomor 1 undang-undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang, dan pasal 2 (3) Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Dalam penelitian ini juga digunakan *comparative approach* atau pendekatan perbandingan, penelitian ini akan menggunakan perbandingan peraturan antara Indonesia dengan Singapura.

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yaitu suatu Metode Analisis data Deskriptif Analitis yang menganalisis tentang undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan pengaturan bitcoin sebagai alat pembayaran yaitu dengan menggunakan undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Pengenaan Pajak Transaksi Online Singapura (IRAS e-tax guide).

1. Alat Tukar/Alat Pembayaran dalam Hukum Indonesia.

a. Sistem Pembayaran Di Indonesia.

Sistem pembayaran dijalankan merupakan bentuk dari tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah sebagaimana yang diamanatkan dalam

² Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press, 2009.
Hlm127

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.95.

Undang-undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Secara umum sistem pembayaran memiliki tujuan yaitu dapat mendorong ekonomi nasional dan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kondisi lingkungan bisnis yang lebih kondusif serta meningkatkan daya asing dan image perekonomian nasional sehingga dapat mendorong investor asing masuk ke Indonesia.

Dalam sistem pembayaran mencakup tentang alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran dan juga sistem transfer dana antar bank yang dipakai dalam proses pembayaran. Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai tatacara dalam pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya yang disebabkan karena adanya transaksi ekonomi. Sehingga dapat kaitkan dengan alat pembayaran seperti cek, Bilyet Giro, wesel-wesel, *electronic funds transfer*, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan *e-money* atau uang elektronik seperti *bitcoins*.

Alat pembayaran adalah komponen penting yang ada dalam sistem pembayaran, maka dari itu dalam sistem pembayaran diperlukan adanya suatu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan.

Sistem pembayaran tidak lepas dari keterkaitan alat atau instrument pembayaran yang legal digunakan. Alat pembayaran dapat dikatakan sebagai media yang digunakan dalam pembayaran. Dalam prakteknya masyarakat masih banyak menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksi, namun dalam perkembangannya selain alat pembayaran *cash based* terdapat alat pembayaran baru yaitu dengan *non-cash* yang dapat digolongkan lagi menjadi paper based seperti cek dan bilyet giro. Menurut Bank Indonesia,

Alat pembayaran tunai yang banyak digunakan adalah uang, baik dalam bentuk uang kertas atau uang logam, karena dinilai masih memainkan peran penting dalam transaksi bernilai kecil Menurut fungsinya uang dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan.

Syarat-syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan uang atau alat tukar adalah benda tersebut harus diterima secara umum atau bersifat *acceptability*, agar dapat diakui sebagai suatu alat tukar umum benda tersebut harus memiliki

nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Suatu benda dapat dijadikan sebagai alat tukar juga harus tahan lama dan tidak mudah musnah (*durability*), mempunyai kualitas yang cenderung sama (*uniformity*), benda tersebut jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*), bersifat *portable* atau mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai benda tersebut, benda tersebut juga harus memiliki nilai yang cenderung sama stabil dari waktu ke waktu (*stability*)⁴

Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah

Di dalam Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 11 disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

Dengan demikian, suatu alat pembayaran dapat dikatakan legal dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Table 3.
Unsur alat pembayaran

Unsur	Keterangan
Kebijakan/perangkat hukum	Peraturan yang dikeluarkan BI, seperti Uu mata uang dan uu BI
Kelembagaan	Dikeluarkan oleh Bank Sentral, otoritas lain, perbankan, lembaga keuangan lain bukan bank, kantor pos, operator mobile phone, perusahaan lain

⁴ Gatot Suparmono, *op.cit*, hlm.12

Alat Pembayaran	Bentuk Fisik	Paper-based & card-based
	Cara Pembayaran	Debit transfer & credit transfer
Mekanisme Operasional		Sistem kliring & transfer dana via RTGS
Infrastruktur		Infrastruktur teknis dalam memproses perpindahan dana seperti jaringan komputer dan perangkat keras/lunak

Sumber: Data primer, diolah, 2014

Demikian pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu barang untuk dapat menjadi alat tukar dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Table 4.
Syarat Alat Pembayaran

Syarat Alat Pembayaran	Tidak mudah rusak
	Mempunyai kualitas yang cenderung sama
	Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
	Tidak dapat dipalsukan
	Mudah dibawa
	Memiliki nilai yang stabil

Sumber: Data primer, diolah, 2014

b. Bitcoins sebagai alat pembayaran yang legal di Indonesia

Bitcoin berkembang pesat sejak diciptakan tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, kurs

bitcoin pun melonjak naik seiring banyaknya permintaan. *Bitcoin* muncul karena akibat dari Great Recession dan krisis keuangan yang terjadi di tahun 2008, *bitcoin* merupakan reaksi dari revolusi keuangan yang terjadi selama 20 tahun terakhir. Seperti yang telah diketahui *bitcoin* adalah alat pembayaran yang menggunakan *peer-to-peer network* yang umum digunakan oleh para programmer. *Bitcoin* menggunakan jaringan *peer-to-peer* atau *file-sharing service* karena kita bisa membagi file *bitcoin* kepada sesama pengguna dengan media jaringan komputer. Konsep dibalik *bitcoin* adalah untuk memangkas biaya yang digunakan untuk membayar makelar yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli konvensional, sehingga dengan memangkas biaya makelar ini penjual dapat menawarkan barangnya lebih murah.

Inti utama dari *bitcoin* adalah buku besar umum (*global ledger*) atau neraca (*balance sheet*), yang disebut dengan *blockchain*. Buku besar umum ini mencatat semua transaksi yang dilakukan menggunakan *bitcoin*, dari sejak *bitcoin* ditambang semua transaksi dicatat, sehingga hal inilah yang membuat *bitcoin* tidak mudah dipalsukan.

unsur-unsur *bitcoin* adalah adanya jaringan *peer-to-peer*, blok, *blockchain* dan *miners*. Jaringan *peer-to-peer* dalam *bitcoin* memperbolehkan pengguna untuk mentransfer sejumlah nilai *bitcoin*, transaksi ini disimpan dalam file yang disebut dengan blok, blok-blok ini akan terjalin satu sama lain sehingga membentuk rantai blok yang disebut dengan *blockchain*, dan *miners* memecahkan formula matematika kompleks untuk membuktikan kepemilikan *bitcoin*.

Untuk dapat menggunakan *bitcoin* sebelumnya pengguna harus mengunduh *wallet* atau dompet virtual yang bisa didapatkan dari sumber tertentu. Dompet virtual ini terdiri dari 3 jenis yaitu dompet perangkat lunak (*software wallet*), *mobile wallet* dan dompet Web (*web wallet*). Perbedaan dari ketiga *wallet* tersebut adalah terletak pada dimana *bitcoin* itu disimpan. Pada dompet perangkat lunak atau *software wallet*, *bitcoin* akan tersimpan didalam *hard drive* yang artinya komputer apapun yang digunakan untuk mengunduh *software wallet* ini akan menjadi tempat penyimpanan *bitcoin*. Apabila komputer yang digunakan

rusak maka bitcoin yang tersimpan akan ikut hilang. Sedangkan *mobile wallet* sistem kerjanya sama dengan *software wallet* hanya saja media yang digunakan adalah *mobile phone*. Pada *web wallet* menyediakan akses untuk dapat menggunakan bitcoin dimana saja dengan menggunakan internet. Tak jauh berbeda dengan *online banking*, dengan *web wallet* pengguna dapat melihat jumlah *bitcoin* yang tersimpan kapanpun dimanapun. *Wallet* ini mempunyai fungsi yang sama dengan bank-bank konvensional lainnya, yaitu melindungi harta nasabah atau pengguna dari ancaman penjahat, namun *wallet* juga memiliki perbedaan yaitu tidak ditanggung oleh pemerintah, apabila sesuatu terjadi pada *wallet* pengguna seperti serangan *hacker* maka *bitcoin* yang tersimpan didalam *wallet* tidak bisa ditanggung resiko oleh pemerintah. Bitcoin merupakan alat pembayaran yang tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan transaksi karena bitcoin tidak membutuhkan jasa makelar. Pada mata uang konvensional dibutuhkan prosedur panjang dan biaya untuk melakukan transaksi.

Perbedaan lain antara *bitcoin* dan mata uang konvensional dapat dilihat dalam table berikut:

Table 6.
Perbandingan bitcoin dengan mata uang lain

Bitcoin	Mata uang lain
Menggunakan teknologi peer-to-peer dan tanpa otoritas pusat atau lembaga untuk mengawasi operasi	Dikeluarkan oleh bank sentral sebagai bentuk dari kewenangannya mengelola kebijakan moneter nasional
Bitcoin dirancang untuk menjadi mata uang digital	Diciptakan dalam bentuk fisik
Jumlah bitcoin yang diproduksi dibatasi sampai 21 juta	Dapat diterbitkan tanpa batas

Membutuhkan tingkat pengetahuan yang tinggi karena menggunakan teknologi cryptocurrency	Tidak membutuhkan teknologi dan pemahaman mendalam
Penerimaan masih terbatas, hanya dapat digunakan di toko-toko tertentu	Dapat digunakan dan diterima dimana saja

Sumber: Data primer, diolah, 2014

Dengan demikian, dengan membandingkan sistem bitcoin dengan sistem pembayaran maka, status kelegalan bitcoin untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia dapat dilihat dalam table berikut:

Table 7.
Kelegalan bitcoin dengan sistem pembayaran

Unsur		Keterangan	Bitcoin
Kebijakan/perangkat hukum		Peraturan yang dikeluarkan BI, seperti Uu mata uang dan uu BI	Belum ada kebijakan/perangkat hukum yang mengatur
Kelembagaan		Dikeluarkan oleh Bank Sentral, otoritas lain, perbankan, lembaga keuangan lain bukan bank, kantor pos, operator mobile phone, perusahaan lain	Dikelola oleh bitcoin.co.id
Alat Pembayaran	Bentuk Fisik	Paper-based & card-based	Digital-based

	Cara Pembayaran	Debit transfer & credit transfer	Tidak ada sistem transfer ⁵
Mekansime Operasional		Sistem kliring & transfer dana via RTGS	-
Infrastruktur		Infrastruktur teknis dalam memproses perpindahan dana seperti jaringan komputer dan perangkat keras/lunak	

Sumber: Data primer, diolah, 2014

Sedangkan kelegalan bitcoin menurut syarat-syarat alat pembayaran dapat dilihat dalam table berikut:

Table 8.
Kelegalan bitcoin menurut syarat pembayaran

Syarat alat pembayaran	Bitcoin
Diterima secara umum dengan nilai tinggi dan dijamin oleh pemerintah	Tidak
Tidak mudah rusak	Ya
Mempunyai kualitas yang cenderung sama	Ya
Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat	Tidak
Tidak dapat dipalsukan	Ya
Mudah dibawa	Ya
Memiliki nilai yang stabil	Ya

Sumber: Data primer, diolah, 2014

⁵ Payment Methods, https://en.bitcoin.it/wiki/Payment_methods (diakses pada 29 Desember 2014)

c. Bitcoin sebagai alat pembayaran di Singapura (suatu perbandingan)

Eksistensi *bitcoin* tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di Singapura. Di Singapura *bitcoin* banyak digunakan oleh masyarakat setempat sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual-beli atau dari menukar dengan uang tunai lain. Namun, kepemilikan *bitcoin* tidak dilarang oleh pemerintah, begitu pula dengan kegiatan transaksi yang menggunakan *bitcoin* dan cara memperoleh *bitcoin* dengan cara *mining* diperbolehkan oleh pemerintah Singapura untuk dilakukan.

Pemerintah Singapura sebelumnya telah menekankan bahwa uang virtual adalah bukan merupakan alat pembayaran yang legal karena tidak sesuai dengan keamanan yang di atur dalam *Securities and Futures Act* yang berlaku di Negara tersebut, namun melihat keadaan perekonomian yang semakin maju yang dipengaruhi oleh alat pembayaran virtual ini, pada maret 2014 *Monetary Authority of Singapore* (MAS) mengeluarkan regulasi untuk mengatur *bitcoin* di Singapura untuk menghindari tindak pidana yang dikhawatirkan terjadi karena adanya penggunaan uang virtual ini, seperti tindak pidana pencucian uang atau untuk kegiatan terorisme. Pertukaran *bitcoin* di Singapura sampai saat ini belum membutuhkan izin operasi, hanya saja sejauh ini pihak berwenang hanya mengingatkan para pengguna atas resiko yang akan didapat dari melakukan transaksi *bitcoin* ini dan telah menyatakan bahwa alat pembayaran virtual akan di anggap sebagai penyedia jasa yang akan dikenakan GST atau *Goods and Services Tax*.

Pengaturan pengenaan pajak terhadap *bitcoin* di Singapura telah di berlakukan sejak awal tahun 2014 dalam situs resmi pemerintahan www.iras.gov.sg menyatakan bahwa “*Businesses that choose to accept virtual currencies such as Bitcoins for their remuneration or revenue are subject to normal income tax rules. They will be taxed on the income derived from or received in Singapore. Tax deductions will be allowed, where permissible, under our tax laws.*” Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa segala bentuk jualbeli

yang menerima uang virtual seperti *bitcoin* sebagai alat pembayaran akan dikenakan pajak atas penghasilan yang didapat atau diperoleh di Singapura yang diatur dalam undang-undang Pajak Singapura

Semua barang fisik yang dipasok melalui Internet dan dilakukan di Singapura dikenakan GST atau pajak transaksi sebesar 7% atas keuntungan barang tersebut. Sehingga, apabila kita membeli *bitcoin* seharga \$100 maka akan dikenai pajak sebesar 7% dan harus membayar sebesar \$107 setelah pajak.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah di jabarkan pada bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan bahwa *bitcoin* dapat menjadi alat pembayaran yang legal di Indonesia karena *bitcoin* memenuhi sebagian besar syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai alat pembayaran, yaitu:

1. Tidak mudah rusak
2. Mempunyai kualitas yang cenderung sama
3. Tidak dapat dipalsukan
4. Mudah dibawa
5. Mempunyai nilai yang stabil

Hanya saja *bitcoin* terhambat oleh tidak adanya regulasi dari pemerintah dan tidak ada hukum yang melindungi pengguna *bitcoin* sehingga apabila terjadi sesuatu pada para pengguna seperti kehilangan *bitcoin*, para pengguna tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah.

Namun penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia semakin meningkat dan tidak dapat dibendung, maka untuk menghindari tindak pidana yang melanggar undang-undang dan bersifat merugikan penggunaan *bitcoin* perlu adanya regulasi yang mengatur baik dari pemerintah atau dari Bank Indonesia.

Di Singapura peredaran *bitcoin* pun juga meningkat, namun pemerintah Singapura telah mengambil tindakan atas hal ini yaitu meregulasi bitcoin dengan pengenaan pajak atas segala transaksi yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran untuk menghindari terjadinya tindak pidana pencucian uang atau kegiatan terorisme. Indonesia dapat mencontoh Singapura dengan meregulasi

bitcoin dengan pengenaan pajak. Hal ini dapat mencegah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang dan juga dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia karena apabila transaksi *bitcoin* ini meningkat tiap tahunnya maka pajak atas *bitcoin* ini akan meningkat pula sehingga dapat menambah pendapatan Negara dari hasil pajak pengenaan pada transaksi *bitcoin*.

b. Saran

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat mengambil tindakan terhadap pengaturan *bitcoin* sebagai alat pembayaran dengan mengeluarkan regulasi tentang pengaturan *bitcoin* sehingga jelas kedudukannya dan masyarakat yang menggunakan dapat mendapatkan perlindungan hukum.
2. Bagi masyarakat diharapkan untuk dapat lebih berhati-hati dalam pemakaian *bitcoin* sebagai alat pembayaran selama belum ada regulasi dari pemerintah atau Bank Indonesia karena tingkat sekuritas yang lemah disebabkan belum adanya perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdurrahman Muslan, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, Malang, UMM Press, 2009.

Gatot Suparmono, **Hukum Uang Di Indonesia**, Bekasi, Gramata Publishing, 2014

Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005

INTERNET

Apa Itu Bitcoins, <https://bitcoin.org/id/faq>

Payment Methods, https://en.bitcoin.it/wiki/Payment_methods

**BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG LEGAL
DALAM TRANSAKSI ONLINE**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

**Disusun Oleh :
TIARA DHANA DANELLA**

NIM: 115010107111116



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

